tirto.id

KURAWAL FOUNDATION
include | protect | engage

DINASTI POLITIK



KELUARGA PRESIDEN JOKOWI

DINASTI POLITIK KELUARGA PRESIDEN JOKOWI

©2020, *Tirto & Kurawal Foundation*

Reporter:
Aulia Adam
Felix Nathaniel
Irwan Syambudi
Reja Hidayat
Zakki Amali

Periset:
Adhi Baskara

Editor:
Fahri Salam
Ivan Aulia Ahsan
Nurul Qomariyah

Ilustrator:
Louis Lugas

Perancang sampul:
Gery Paulandhika

Penata letak:
M. Sadam Husaen

e-Book, Desember 2020
iv + 67 halaman
14,8 cm x 21 cm

Buku ini dicetak dalam versi elektronik. Dibuat untuk tujuan pendidikan.
Tidak untuk diperjualbelikan. Pengutipan isi buku harus mencantumkan sumber.
Hak cipta dipegang Tirto & Kurawal Foundation.

Daftar Isi

PILKADA SOLO

1 Dugaan Makelar KTP agar Gibran Tak Melawan Kolom Kosong
Irwan Syambudi

17 Dugaan Komisioner KPU Solo Bagi-Bagi Duit untuk Mengamankan Bajo
Zakki Amali

BISNIS KELUARGA JOKOWI

26 Keluarga Pebisnis dan Konglomerat di Balik Bisnis Gibran dan Kaesang
Fahri Salam & Reja Hidayat

41 Jejak Bisnis Bobby Nasution
Aulia Adam

KEKUASAAN

48 Oligarki Kian Mencengkeram dan Demokrasi Makin Semu
Felix Nathaniel

PILKADA SOLO

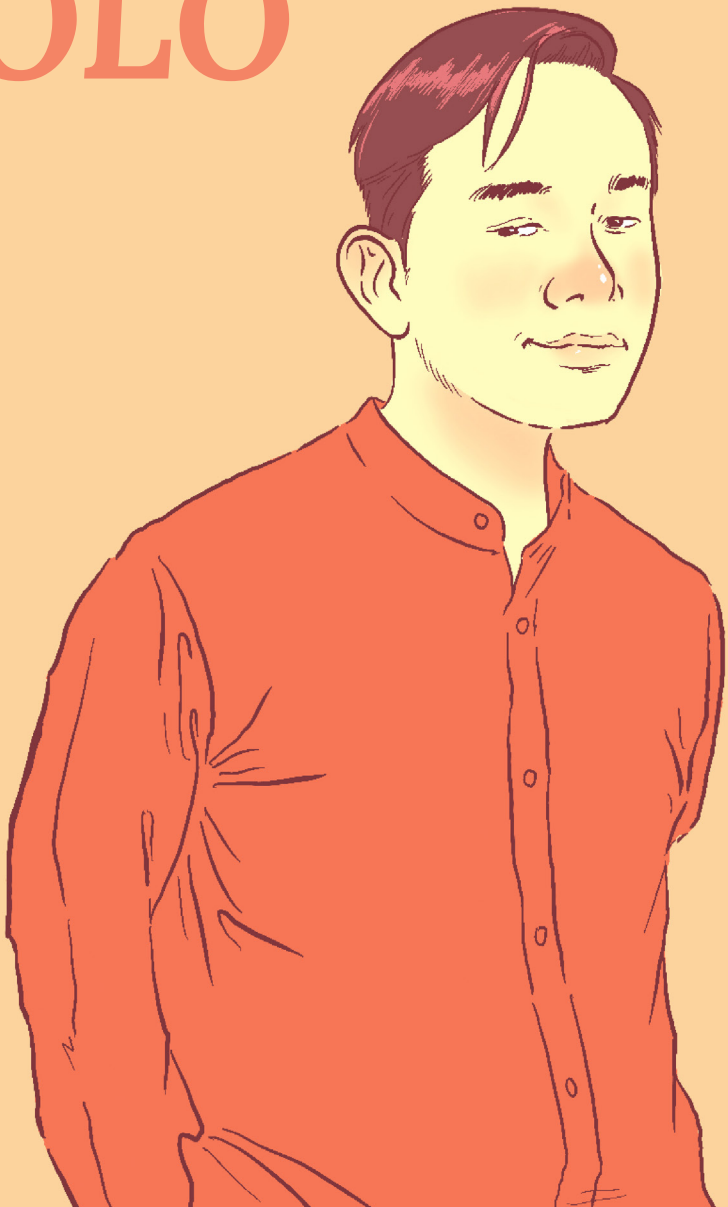

TIRTO | 8 DESEMBER 2020

Dugaan Makelar KTP agar Gibran Tak Melawan Kolom Kosong

- Seorang makelar politik bercerita kepada kami bahwa dia mengumpulkan ribuan dukungan KTP bagi pasangan Bajo dalam proses kandidat jalur perseorangan ke KPU Surakarta. Tujuannya agar kondisi keamanan Kota Solo tetap "kondusif"

- Dugaan donatur operasi yang dijalankan Sapardi mengarah kepada jenderal bintang dua dan seorang perwira pertama di Polresta Surakarta. Keduanya membantah dan mengaku tidak mengenal Sapardi

Sejumlah warga tercatat sebagai pendukung calon independen Pilkada Solo, Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo), tak pernah diminta surat pernyataan dan kartu tanda penduduk. Saat verifikasi, ada yang menolak dan ada yang mendukung Bajo setelah dijanjikan sembako.

Seorang bernama Sapardi mengklaim kepada *Tirto* bahwa ia mengumpulkan ribuan KTP warga Solo dengan berbagai cara untuk membantu Bajo. Ia mengklaim ada permintaan kepada dia buat menjalankan operasi tersebut. Tujuannya, demi "keamanan" Kota Solo.

Puluhan ribu dukungan dalam bentuk fotokopi KTP dan surat pernyataan dikumpulkan dalam waktu singkat oleh tim Bajo: 41.425 KTP dukungan diserahkan ke KPU pada 21 Februari 2020; dan 21.603 KTP saat perbaikan pada 26 Juli. Total KTP dukungan yang lolos verifikasi ada 38.831 suara. Pasangan Bajo lolos bahkan melebihi syarat minimal dukungan sebanyak 35.870 suara untuk bertarung melawan putra sulung Presiden Joko Widodo, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Surakarta pada akhir Agustus 2020.

Namun, bagaimana pasangan non-partai ini dapat mengumpulkan dukungan KTP warga sebanyak itu?

KTP Dicatut untuk Dukung Bajo

Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya, yang tinggal di Kampung Tegalsari, Laweyan, bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim adalah kakak kandung Muhammad Ali Naharussurur (Abah Ali), pengasuh Ponpes Ta'mirul Islam Solo. Abah Ali mendaftar

sebagai calon Wali Kota Solo dari jalur perseorangan. Ia kandas saat tahap administrasi di KPU Surakarta.

Pada akhir Juni 2020, Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara (PPS) bersama tim verifikasi Bajo. Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim masih bingung. Ia bertanya, bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya? Tim verifikasi Bajo tak bisa menjawab kebingungannya. Mereka hanya bilang KTP didapatkan dari tim lapangan. Tak ingin memperpanjang urusan, ia menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo dalam formulir lampiran model BA.5-KWK Perseorangan dari KPU.

"Waktu itu kami menolak. Kami bukan pendukung Bajo," kata Halim kepada tim kolaborasi *Tirto* dan *Suara.com* pada pekan ketiga November 2020.

Tresno Subagyo, warga Mojosongo, Jebres, yang kami temui pada akhir November 2020, juga mengalami hal serupa. Tresno kaget saat didatangi petugas PPS dari KPU yang menyampaikan namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo. "Karena saya merasa tidak mendukung, maka saya mengatakan saya tidak mendukung," kata Tresno, lalu menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo.

Nicolous Irawan Ika Paksi juga kaget saat mengetahui ia dan tiga anggota keluarganya termasuk ayah, ibu, dan adiknya, yang tinggal di Kampung Jogobayan, Banjarsari, masuk dalam daftar pendukung Bajo. KTP dan pernyataan dukungan mereka tercatat di KPU. Ia baru tahu itu saat PPS dari KPU melakukan verifikasi mendatangi rumahnya.

Nico berkata ia tak pernah memberikan dukungan kepada calon siapa pun. Profesinya sebagai wartawan mengharuskannya untuk independen, sehingga tak mungkin ia memberikan KTP

dukungan untuk pasangan calon di Pilkada. Ia juga kaget sebab, setelah menikah sejak Januari 2020, ia telah pindah penduduk ke Purworejo, Jawa Tengah. Seharusnya ia tak memiliki hak pilih lagi untuk Pilkada Solo.

"Akhirnya saya tanda tangan surat pernyataan [tidak mendukung Bajo], ayah, ibu dan adik saya juga," kata Nico.

Temuan sejumlah warga yang dicatut KTP mereka untuk mendukung Bajo mencuat.

Pada 11 Agustus 2020, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan itu ke Badan Pengawas Pemilu Solo. Tresno dan Halim menjadi saksi atas temuan tersebut. Namun, Bawaslu menghentikan penanganan perkara itu.

Ketua Paguyuban, Johan Syafaat Mahanani, berkata saat itu menemukan lima warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya, dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo. Namun, hanya dua warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu. Ia meyakini, bila prosedur pemilihan ini dijalankan dengan benar, ada ribuan orang yang ketahuan KTP mereka dicatut untuk mendukung Bajo. Ia curiga KTP yang digunakan merupakan KTP dukungan yang sebelumnya telah dipakai para calon legislatif saat Pemilu 2019.

"Bisa jadi seperti itu," kata Johan di rumahnya, kawasan Pajang, Laweyan, kepada *Tirto*.

Banyak KTP dukungan yang didapatkan Bajo dan temuan orang-orang yang menyatakan KTP mereka dicatut juga dicurigai oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Solo, Muhammad Taufiq. Taufiq telah mengirimkan surat desakan kepada KPU untuk transparan.

Taufiq berkata pencatutan surat dan KTP dukungan itu dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada.

Dan, jika terbukti ada pemalsuan dokumen KTP, bisa dijerat pidana dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. "Jadi, mulai pengumpul [KTP], KPU, dan kandidat bisa kena [pidana]. Jadi, sebaiknya jangan coba main-main dengan persoalan ini," tulis Taufiq dalam surat permintaan transparansi verifikasi dukungan Bajo kepada KPU, 29 Juli 2020.

Klaim Sapardi: Penggalangan KTP Dukungan Bajo demi "Keamanan" Kota Solo

Sapardi, yang mengklaim kepada *Tirto* sebagai operator yang mengumpulkan ribuan KTP dukungan ke Bajo, adalah Sekretaris Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR), organisasi pendukung Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019. Organisasi ini maupun Paguyuban Bina Warga Sejahtera menyatakan dukungan kepada Bajo pada Agustus 2020.

Di kantor sekretariatnya di Kerten, Kecamatan Laweyan, saat kami menemui Sapardi pada akhir November 2020, terlihat tumpukan kertas formulir pendukung Bajo, yang menurut Komisi Pemilihan Umum masuk informasi dikecualikan bagi publik. Kami menemui Sapardi dalam tiga kesempatan berbeda di kantor yang sama untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dia, apakah konsisten ataukah saling bertentangan. Pertemuan pertama disaksikan oleh Agung Priantoro, anak buah Sapardi.

Sapardi bukan purnawirawan. Ia simpatisan dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan sejak 1977. Ia mengklaim kerja penggalangan suara atau pengumpulan KTP dilakoninya sejak Pemilu 1999. Itu berlanjut kerja-kerja penggalangan KTP untuk calon legislatif.

Mudrick Sangidu, operator politk gaek Solo pendiri koalisi 'Mega-Bintang' pada akhir kekuasaan Orde Baru, menyebut Sapardi adalah bekas "anak buah" dia ketika kami menunjukkan foto Sapardi. Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikadin Solo, Muhammad Taufiq, mengenal Sapardi sebagai "makelar suara" sejak dia jadi pengurus PPP. Sementara Johan Syafaat Mahanani, yang masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPC PPP, mengaku pernah ditawari Sapardi untuk membeli KTP dukungan saat maju menjadi Caleg DPRD Solo pada 2009.

Dalam arsip berita pada Agustus 2019, Sapardi melaporkan dua pengurus Partai Gerindra Solo ke Polresta Surakarta dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dua pengurus partai itu belum membayar uang saksi kepada 3.468 orang, tuding Sapardi yang menjadi koordinator saksi Partai Gerindra pada Pemilu 2019.

Sapardi mengklaim kepada kami bahwa dia mengumpulkan 60 ribu KTP dukungan untuk Bajo.

"[Saya] dimintai bantu meloloskan [Bajo] karena kaitannya dengan keamanan Kota Solo. Supaya situasi di Solo tetap kondusif. [Gibran] harus ada lawan," klaim Sapardi.

Bagaimana Sapardi Mengumpulkan KTP?

Sapardi menugaskan Agung Priantoro, anak buahnya, sebagai koordinator lapangan untuk seluruh koordinator pengumpulan KTP di tingkat kecamatan. Tiap kecamatan, ada tiga sampai empat koordinator; begitupun di tingkat kelurahan.

Koordinator di tingkat desa kemudian mengkoordinasi di tingkat RT/RW. Namun, cerita Sapardi, hanya 25 persen atau

15.000 dari 60.000 KTP yang mereka dapatkan dengan cara demikian. Jumlah lebih banyak didapatkan dengan cara "grosir", cerita Sapardi. Cara ini dia dapatkan dari para tim sukses yang pernah mengumpulkan KTP untuk para caleg.

"75 persen [dari 60 ribu] KTP dari KTP grosir," kata Sapardi.

Dana operasional penggalan KTP ini disebut-sebut sebesar Rp1,5 miliar atau Rp25.000 per KTP.

Alokasinya: Rp10.000 untuk pemilik KTP yang diberikan dalam bentuk sembako setelah dukungan mereka dinyatakan memenuhi syarat KPU; Rp10.000 untuk mereka yang mencari atau mengumpulkan KTP; Rp4.000 untuk koordinator lapangan; dan Rp1.000 untuk operasional.

Artinya, jika mengikuti cerita Sapardi: Rp600 juta untuk sembako; Rp600 juta untuk pengumpul KTP; Rp240 juta untuk koordinator lapangan; dan Rp150 juta untuk operasional.

Sapardi menunjukkan formulir model B.1.1-KWK. Formulir ini merupakan surat pernyataan daftar nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada Solo setelah tahap perbaikan. Formulir ini hanya bisa dipegang oleh tim pemenangan resmi atas izin akses KPU. Nama Sapardi tak tercantum dalam data tim pemenangan resmi Bajo.

Tudingan Jenderal Polisi Mendanai Operasi Sapardi

Seorang narasumber yang minta namanya anonim menyebut dana Rp1,5 miliar untuk operasi yang dijalankan Sapardi itu disponsori oleh seorang jenderal polisi bintang dua. Perantaranya adalah seorang polisi dari Satuan Intelkam Polresta Surakarta.

Transaksi dana operasi itu dilakukan beberapa kali, dibayar *cash* per termin sesuai progres pekerjaan, menurut sumber bersangkutan kepada *Tirto*.

Tudingan polisi di balik operasi penggalangan KTP yang dikerjakan Sapardi mengarah kepada Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi. Sementara yang dituding perantaranya perwira pertama Setiawan Heri Karyadi di Polresta Surakarta.

Ahmad Luthfi adalah mantan Kapolresta Surakarta. Ia sempat menjabat Wakapolda Jateng. Luthfi adalah segelintir Kapolda aktif di Indonesia yang bukan lulusan Akpol. Namanya juga beredar sebagai kandidat calon Kapolri.

Setiawan Heri Karyadi, dalam arsip pemberitaan pada 11 Juli 2018, adalah satu dari empat pejabat polisi yang menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya oleh Presiden Jokowi.

Lewat aplikasi pengecekan nomor telepon, Get Contact, nomor telepon Setiawan ditandai oleh lawan bicaranya sebagai "Surakarta RI-1", "Acara Kahiyang", "Jaga rumah Jokowi", "Gibran", dan "LO KPU Solo", dari 100-an penanda lain. LO di sini, maksudnya, *liaison officer* atau pengawal Gibran dalam Pilkada Solo 2020.

Tirto dan *Suara.com* melihat Setiawan mengawal Gibran saat putra sulung Presiden Jokowi itu berkampanye di Pasar Gede Solo, 28 November 2020.

Tirto dua kali menawarkan wawancara tatap muka dengan Setiawan, tapi dia menolak. Saat wawancara via telepon, untuk mengklarifikasi tudingan itu, Setiawan berkata tidak mengenal Sapardi.

"Saya enggak tahu apa-apa. Tugasku hanya pengawalan," kata Setiawan kepada reporter *Tirto* Zakki Amali pada awal Desember 2020.

"Tidak usah memancing, jangan ditulis. Kalau ditulis,

Sumber: Reportase Tirto.id
LGS

DEMI TIDAK MELAWAN KOTAK KOSONG

Kejanggalan Pengumpulan KTP

Muhammad Halim, **Tresno Subagyo**, & **Nicolous Irawan Ika Paksi** dicatut namanya dalam daftar pendukung **Bagyo Wahyono-FX Suparjo** (***Bajo***)

4 narasumber lain tidak tahu KTP mereka terdaftar sebagai pendukung Bajo. Saat diverifikasi, mereka diiming-imingi beras 5 kg. Mereka setuju memberi dukungan

Sebagian fotokopi KTP dukungan didapatkan tim secara gelap tanpa persetujuan pemilik

Sapardi mengaku yang mengumpulkan KTP tersebut. Ia mengklaim dibayar **Rp1,5 miliar** untuk meloloskan pasangan Bajo agar Pilkada Solo tidak melawan kotak kosong.

Jalan Bajo mulus hingga lolos verifikasi KPU Solo. Bakal calon jalur perseorangan lain, **Muhammad Ali Naharussurur**, mengaku dipersulit, kandas dalam tahapan administrasi.

Kronologi Verifikasi KTP Pendukung Bajo

Syarat KPU Solo: ***minimal 35.870 orang***

21 Februari 2020

Pasangan Bajo menyerahkan **41.425 KTP**



Lolos verifikasi administrasi **36.006 KTP**

Lolos verifikasi faktual tahap I **28.629 KTP**

(kurang 7.241 orang)

Verifikasi faktual tahap I berakhir 12 Juli 2020. Batas akhir rekap tingkat kota **20-21 Juli 2020**

26 Juli 2020

Pasangan Bajo dalam kurang dari seminggu menyerahkan **21.603 KTP**

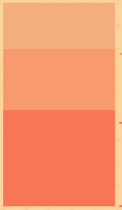

Lolos verifikasi perbaikan **16.700 KTP**

Lolos verifikasi faktual tahap II **10.202 KTP**

Verifikasi faktual tahap II berlangsung 9-15 Agustus 2020

Bajo lolos dengan dukungan **38.831 KTP**, dari total **63.028 KTP** yang diserahkan ke KPU

berbahaya," tambahnya, sambil mengancam akan mencari Zakki bila namanya muncul dalam berita terkait tudingan ini.

Tirto dan Suara.com mengontak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, pada 7 Desember, tapi tak dibalas. Pada Selasa pagi, 8 Desember, *Tirto* mengirim pesan kepada Luthfi untuk mengonfirmasi tudingan di atas. Luthfi menjawab dengan menelepon balik, "Saya enggak kenal [Sapardi]. Enggak tahu. Kita netral. Anggota saja, kita kerasin."

Ia juga membantah tudingan lain soal ada perwira Polresta Surakarta bernama Setiawan dalam operasi Sapardi. "Enggak ada. Enggak kenal," katanya.

Menerima Sembako bila Bersedia Mendukung Bajo

Tim *Tirto* dan *Suara.com* menelusuri beberapa nama yang tercantum dalam formulir pernyataan dukungan dari berkas yang kami foto di kantor Sapardi.

Ada empat orang yang kami temui di Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon. Mereka adalah Saiko Rini, Surati, Sri Handayani, dan Ismartini. Seluruhnya mengaku tak pernah tahu bagaimana KTP mereka bisa masuk dalam daftar pendukung Bajo.

Mereka tiba-tiba diundang oleh orang yang mereka identifikasi sebagai tim sukses Bajo untuk datang ke kelurahan pada Juli 2020. Rentang ini merupakan jadwal verifikasi lapangan untuk KTP dukungan tahap perbaikan, yang telah diserahkan kubu Bajo ke KPU.

Ismartini berkata ada orang ke rumahnya dan menyampaikan agar besok sore datang ke kelurahan. "Nanti pulang dapat

sembako," katanya, mengisahkan ulang. Tiba di kelurahan, ia menunjukkan KTP dan ditanya kesediaan mendukung Bajo. Ismartini mengiyakan. Tiga hari setelahnya, ia diminta mengambil sembako berupa beras 5 kilogram di rumah orang yang mengundangnya.

Sama hal dengan Sri Handayani. "Saya tidak tahu, kok bisa masuk data saya? Sebelum itu juga tidak ada orang yang datang untuk sosialisasi soal Bajo. Hanya tiba-tiba ada yang datang minta ke kelurahan dan bawa KTP," katanya.

Sementara di Kelurahan Semanggi, beberapa orang yang namanya telah terdata KPU sebagai pendukung Bajo, malah menyatakan sebagai pendukung Gibran dan merasa tak pernah memberikan KTP dukungan ke Bajo.

Salah satunya Sri Sugarni bersama suaminya, Uzank Beny Saputra. "Kita enggak tahu [kalau masuk daftar pendukung Bajo]. Kita mendukung Pak Gibran-Teguh dari awal," kata Sri, menambahkan suaminya bahkan ikut dalam tim sukses Gibran-Teguh. Di depan rumahnya, ada spanduk Gibran-Teguh.

Saiful Amri juga demikian. Ia kaget namanya dalam daftar pendukung Bajo. Satu waktu ia pernah didatangi oleh tetangga beda RW yang mengaku petugas KPU. Petugas itu tak memberi tahu bahwa Amri masuk daftar KTP pendukung Bajo. Si petugas hanya bertanya apakah dia mendukung Bajo atau tidak. "Ini buat verifikasi dukungan ke KPU. Saya bilang, 'Saya mendukung'," kata Amri. Ia tak tahu hanya dengan menjawab pertanyaan itu, namanya masuk dalam daftar dukungan Bajo, padahal tak pernah merasa mengumpulkan KTP. Amri pernah menjadi saksi PDIP pada Pemilu 2019 dan pada Pilkada 2020 ini menjadi saksi Gibran-Teguh.

Dasar KPU: 'Mendukung atau Tidak Mendukung'

Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa didukung oleh kekuatan parpol, minus Partai Keadilan Sejahtera, pada Pilkada 2020. Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi. Teguh adalah politikus senior di PDIP Solo.

Ada tiga bakal pasangan calon yang maju lewat jalur perseorangan. Selain Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo), ada Alam Mitah Haliem Hartanto & Ronie Cakranegara (Hero), dan Abah Ali-Gus Amak (Alam). Dua terakhir tidak lolos dalam tahap administrasi.

Pasangan Bajo menyerahkan total 63.028 KTP, masing-masing 41.425 KTP pada tahap perdana, dan 21.603 KTP pada tahap perbaikan. Ribuan KTP itu harus lolos verifikasi administrasi, salah satunya mewakili nisbah penduduk dari lima kecamatan di Kota Solo. Setelahnya, ada proses verifikasi faktual. KPU Surakarta memutuskan syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan sebanyak 35.870 warga.

Pada Juli-Agustus 2020, saat verifikasi faktual tahap pertama dan perbaikan, KPU memutuskan 28.629 orang memenuhi syarat dukungan untuk Bajo (diputuskan pada 20 Juli); berikutnya, 10.202 orang memenuhi syarat dukungan (diputuskan KPU pada 21 Agustus). Total, pasangan Bajo mengumpulkan 38.831 KTP dukungan sehingga mereka bisa melaju untuk melawan Gibran-Teguh.

Ketua KPU Surakarta, Nurul Sutari, menerangkan kepada *Tirto* dan *Suara.com* bahwa proses rekapitulasi dukungan telah dicocokan dengan data Bawaslu, apakah ribuan KTP warga yang dikumpulkan oleh kubu Bajo itu, saat dicek ke rumah mereka satu demi satu, bersedia mendukung atau tidak.

Jika tidak mendukung, katanya, data itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan dibuktikan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh warga bersangkutan.

Jika tidak ada surat pernyataan yang ditandatangani, warga tersebut tetap dianggap mendukung, kata Nurul.

"Dasar KPU hanya mendukung atau tidak mendukung. Kalau tidak mendukung, harus disertai surat pernyataan dan ditandatangani," ujar Nurul di kantor KPU Surakarta, akhir November 2020.

Kubu Bajo: 'Saya Tidak Mau Tahu' atas Apa yang Dikerjakan Sapardi

Apa yang dikatakan Nurul Sutarti sesuai pernyataan sejumlah warga yang terdaftar sebagai pendukung Bajo, yang ditemui oleh *Tirto* dan *Suara.com*. Mereka tidak pernah ditunjukkan bukti bahwa mereka mendukung, tapi hanya ditanya: Apakah mereka mendukung atau tidak.

Ketua Tim Pemenangan Bajo Sigit Prawoso mengakui kepada *Tirto* bahwa tidak semua KTP dukungan yang dikumpulkan oleh relawan mereka itu valid. "Mungkin mereka menyimpan KTP teman atau apa ... akhirnya dimasukkan. Kadang macam-macam seperti itu," katanya via telepon, awal Desember 2020.

Jika ada warga yang masuk data mereka tapi tidak mendukung Bajo, itu bukan kesalahan pihaknya, menurut Sigit. "Yang salah bukan kita. Tapi, yang salah KPU."

Soal dugaan makelar KTP yang dijalankan oleh Sapardi, Sigit menanggapi bahwa proses transaksinya bukan membeli Tim Bajo, melainkan saat pengumpulan KTP untuk diserahkan ke

KPU. Sigit berkata mengenal Sapardi sebagai relawan tim pemenangan Bajo.

Tuntas Subagyo, penasihat tim pemenangan Bajo dan Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, organisasi masyarakat yang mengusung pasangan Bajo, berkata mengenal Sapardi sebagai relawan yang membantu kubu mereka. Ia mengakui memberikan dana operasional untuk penggalangan dukungan ke Sapardi setelah Bajo lolos verifikasi.

Sapardi, katanya, sejak awal turut membantu penggalangan dukungan KTP. Namun, ia tak pernah tahu siapa yang menggerakkan Sapardi yang diakuinya turut membantu pengumpulan KTP hingga lebih dari 50 persen dari total KTP yang didapatkan kubu Bajo.

"Saya hanya tahu beliau [Sapardi] punya keinginan membantu Bajo mendapatkan KTP dan lolos," kata Tuntas kepada *Tirto*, akhir November 2020.

Bagaimana atas tudingan bahwa polisi sebagai donatur operasi penggalangan KTP yang dijalankan Sapardi?

"Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Yang penting waktu itu, prinsipnya, kami terserah dengan metode bagaimana kalau itu melibatkan pihak lain. Saya tidak tahu dan tidak mau tahu," ujar Tuntas. Ia berkata tidak mengenal perwira pertama Setiawan Heri Karyadi dari Polresta Surakarta yang menjadi penghubung operasi tersebut.

Tuntas juga menolak kubu Bajo disebut "calon boneka"; calon yang sengaja dibuat agar Gibran-Teguh tidak melawan kotak kosong.

Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan, emoh menanggapi tudingan pasangan Bajo sebagai "calon boneka". "Masak perlu dijawab? Itu hanya anggapan. Dalam politik,

orang bisa beranggapan macam-macam dan itu tidak harus dijawab," kata Putut, awal Desember 2020.

Putut juga mengomentari dugaan bahwa ada aparat kepolisian yang membayar pekerjaan Sapardi untuk Bajo demi "stabilitas keamanan" agar Gibran tidak melawan kolom kosong.

Kata Putut: "Sapardi itu siapa bisa meloloskan Bajo? Memang dia Tuhan? Atau KPU Pusat atau bagaimana?"

Laporan ini dikerjakan berkat kolaborasi dengan Suara.com *serta kontributor Putri dan Ichsan Noor Rasyid.*

UPDATE:

Pada pagi hari pemilihan, 9 Desember 2020, Ketua dan Sekjen DPC Gerindra Surakarta menggelar konferensi pers menanggapi laporan ini yang disebut mereka "bikin heboh Kota Solo". Mereka mengatakan pekerjaan Sapardi, yang diduga menjadi makelar KTP, tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Mereka berkata Sapardi telah "dinonjobkan" dari kepengurusan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Kota Solo, sayap Partai Gerindra. Dalam jumpa pers selama 9 menit ini, mereka tidak membantah laporan kami.

Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa, sebagaimana telah diprediksi oleh banyak orang, mengalahkan secara telak pasangan Bajo. Mereka memperoleh lebih dari 85% suara. Sementara pasangan Bajo meraih 35.113 suara, lebih kecil dari KTP dukungan, yang menguatkan indikasi ada peran makelar KTP.

TIRTO | 8 DESEMBER 2020

Dugaan Komisioner KPU Solo Bagi-Bagi Duit untuk Mengamankan Bajo

- Seorang komisioner KPU diduga membagikan uang ke panitia pemilihan untuk meloloskan pasangan Bajo. Tujuannya, agar tak ada kotak kosong di Pilkada Solo

- Komisioner KPU Surakarta Bambang Christanto membantah kabar dirinya membagikan uang

Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan jalan utama Kota Surakarta depan Taman Kerten di samping jalan layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo.

Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, sayap Partai Gerindra pendukung Prabowo Subianto, cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo). Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut Komisi Pemilihan Umum masuk informasi dikecualikan bagi publik.

Berbekal data pendukung Bajo, kami mendatangi belasan warga di Kelurahan Semanggi dan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian menyatakan mendukung dan lainnya tak pernah setor salinan KTP, tapi namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo.

Satu keluarga di Kelurahan Semanggi, Sri Sugarni (32) dan suaminya, Uzank Beny Saputra (33), berkata tak masuk akal mereka mendukung Bajo setelah diberi tahu namanya masuk daftar KTP pendukung Bajo. Uzank merupakan relawan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Keduanya juga tak pernah diverifikasi oleh petugas pemilihan mendukung Bajo.

"Kami enggak tahu. Kami dari awal dukung Pak Gibran, Pak Teguh, sampai suami terjun ke lapangan [dukung Gibran], jarang pulang," kata Sri ditemui di rumahnya, awal Desember 2020.

Warga lain, David Pramono dan istrinya, mengalami hal sama. Petugas pemilihan yang datang ke rumahnya sejauh ini hanya mendata sebagai pemilih dan memberi undangan untuk mencoblos.

"Bapak tipikal pendiam. Tidak pernah dimintai KTP untuk dukungan," kata istri David.

Masuknya Sri, Uzank, dan David dalam barisan pendukung Bajo dengan demikian diduga cacat prosedural. Namun, dalam Pilkada Solo, cara ilegal meloloskan warga untuk dukung Bajo bisa terjadi diduga akibat peran petugas pemilihan tingkat kelurahan.

Sumber *Tirto* yang terlibat verifikasi dan pemilihan menyebut ada puluhan warga di sebuah kelurahan Kecamatan Laweyan yang tidak setor KTP dan tidak mendukung Bajo telah diloloskan menjadi pendukung pasangan jalur perseorangan itu. Modusnya diduga dengan mencontreng formulir dukungan dan memalsukan tanda tangan kehadiran warga yang absen saat verifikasi faktual. Ia tergerak meloloskan dukungan karena ada permintaan dari atasannya agar Bajo lolos verifikasi faktual di tempatnya bertugas. Atasannya sempat menawari uang dalam selembar amplop, tapi ia menolak.

"Ada sekitar 22 orang yang saya loloskan," kata si sumber yang minta namanya anonim karena khawatir mendapat balasan hukum.

Operasi Ilegal saat Tahap Verifikasi

Dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta itu mengalir ke petugas pemilihan tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Operasi bagi-bagi duit menjelang tahap verifikasi faktual kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) sempat terungkap dalam penyelidikan

Sumber: Reportase Tirto.id
LGS

tirto.id

DUGAAN BAGI-BAGI DUIT KOMISIONER KPU SOLO



Komisioner KPU Surakarta, **Bambang Christanto**, diduga membagikan uang kepada **PPK**, **PPS**, & **verifikator**

Bambang membantahnya

Tujuan bagi-bagi duit untuk meloloskan calon independen Pilkada Solo, **Bagyo Wahyono**-**FX Suparjo** (***Bajo***), dalam tahap verifikasi faktual

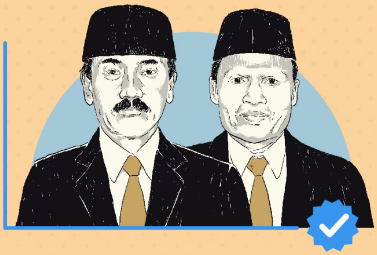

Pola Pembagian

3-2-1

Rp **3** juta untuk **PPK**

Rp **2** juta untuk **PPS**

Rp **1** juta untuk **verifikator**

Puluhan warga di sebuah kelurahan di **Kec. Laweyan** diloloskan untuk dukung Bajo



Sejumlah warga di **Kec. Semanggi** dicatut sebagai pendukung Bajo

Komisioner KPU Surakarta terbelah menangani isu bagi-bagi duit Bambang Christanto

internal KPU Surakarta. Namun, kasusnya tak jelas hingga kini.

Lebih dari dua sumber *Tirto* di lingkungan penyelenggara Pilkada Solo menyebut nama Bambang Christanto sebagai komisioner yang bagi-bagi sogokan kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan hingga kelurahan. Tujuannya disebut agar Bajo lolos verifikasi faktual.

Kesulitan Bajo mengumpulkan dukungan setidaknya tergambar dari data KPU Surakarta, yakni 39,3 persen dari total 63.028 KTP yang disetor, tidak memenuhi syarat saat tahap verifikasi faktual. Dalam Pilkada Solo, semula ada tiga bakal calon independen, tapi hanya Bajo yang lolos. Lawan Bajo adalah Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa, putra Presiden Jokowi dan politikus senior PDIP Solo. Ada dugaan Bajo diloloskan KPU agar tak ada kotak kosong dalam Pilkada Solo.

Dalam tahap verifikasi itulah, kata seorang sumber yang ditawari uang dari Bambang, menyebut pola distribusi dana "3, 2, 1". Artinya, Rp3 juta untuk panitia pemilihan kecamatan, Rp2 juta untuk panitia pemilihan kelurahan, dan Rp 1 juta untuk verifikator.

Uang sogokan itu melebihi honor mereka. Setingkat ketua PPK per bulan mendapat honor Rp1.750.000, sedangkan ketua PPS sebesar Rp900.000 per bulan.

Sumber itu mengatakan, saat pembagian uang, ada kalanya Bambang langsung memberi ke PPS atau jatah PPS dititipkan PPK. Suatu ketika Bambang disebut menghitung uang yang akan dibagikan kepada PPK dan PPS di sebuah rumah makan di daerah Jebres, Surakarta.

Tak semua PPK, PPS, dan verifikator—yang jumlahnya ratusan orang—menerima atau diberi uang sogokan itu. Sebagian menolak

dengan alasan menjaga integritas atau tak memperolehnya karena tak tahu ada "dana operasional" dari Bambang.

Terkait cerita bagi-bagi duit dari Bambang, Komisioner KPU Surakarta bagian hukum dan pengawasan, Puji Kusmarti, tak membantah sekaligus tak membenarkannya.

Ia mengaku tengah mendalami kabar pemberian uang yang diduga membuat verifikasi pendukung calon independen cacat prosedur karena terdapat pencatutan warga.

"Sejauh ini saya sesuai tupoksi, belum bisa menyampaikan benar atau salah," kata Puji kepada reporter *Tirto* saat ditemui di kantor KPU Surakarta, akhir November 2020.

Puji menyebut sudah mengklarifikasi penerimaan uang kepada PPK di lima kecamatan. Ia enggan membeberkan hasilnya karena masuk materi penyelidikan. "Saat ini info-info itu sedang kami dalami," ujarnya.

Berkaitan dengan tindakan sesama komisioner, ia menyebut hal itu ranah KPU Provinsi Jawa Tengah. "Kalau memang terjadi pelanggaran, kita akan sampaikan ke provinsi karena punya kewenangan sanksi setingkat di atasnya," ungkapnya.

Pola bagi-bagi duit untuk memudahkan calon independen lolos dinilai pola baru dalam Pilkada.

Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz, mengatakan biasanya pembagian uang itu sistematis. Biasanya calon independen dipersulit oleh partai politik.

Distribusi uang sogokan juga dinilai baru ditemukan. August mengatakan lazimnya aliran dana untuk komisioner saja atau terjadi antara sesama orang lapangan.

"Diduga calon independen di Solo dipermudah agar tidak muncul pasangan calon tunggal," kata August kepada *Tirto*, awal Desember 2020.

Secara teoritis, kata dia, Bajo kesulitan maju pilkada tanpa sponsor. Dengan operasi dari penyelenggara pemilu yang diduga dilakukan secara sistematis itu jadi salah satu faktor "menjadikannya lolos".

Made Supriatma, peneliti Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak Institute, memperkirakan Bajo mungkin tidak bisa menang, tapi dengan munculnya dugaan bagi-bagi duit, pencatutan dan pemalsuan dukungan, legitimasi Gibran sebagai Wali Kota Surakarta akan berkurang.

Bantahan Bambang Christanto

Bambang Christanto, yang dituding membagikan uang, adalah Komisioner KPU satu periode 2018-2023 yang membidangi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

Pada 2019, ia diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena memakai kaus PDIP dalam Pilpres 2014. DKPP memutuskan Bambang tak bersalah dan merehabilitasi namanya.

Menanggapi tudingan bagi-bagi uang kepada PPK, PPS, dan verifikator, Bambang memilih diam. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Kalau berkaitan ini, saya *no comment* daripada panjang urusannya," kata Bambang ditemui reporter *Tirto* di kantor KPU Surakarta, November 2020.

Bambang juga disebut mengarahkan petugas pemilihan untuk memudahkan verifikasi, tapi ia berdalih permintaan itu dimaksudkan supaya petugas komunikatif, bukan untuk melakukan tindakan curang. Ia mengklaim tak ada kecurangan dalam verifikasi dukungan calon independen.

Ketua KPU Surakarta, Nurul Sutarti, berkata tak ada pembagian uang tersebut.

Nurul mengakui di internal KPU, banyak yang bertanya benar atau tidak soal kabar pemberian uang sehingga diadakan penelusuran. Terlebih pertaruhannya integritas bila melanggar, dan pihak yang salah akan menghadapi sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Nurul mengaku sudah mengklarifikasi kepada petugas tingkat kecamatan. Hasilnya, tidak ditemukan bukti pembagian uang, sehingga kini tak ditindaklanjuti oleh Nurul.

"Kalau kami tidak menemukan. Kalau kami tanya, mereka tidak ini [menerima uang]," kata Nurul di sela-sela rapat koordinasi daring di kantor KPU Surakarta, akhir November 2020.

BISNIS KELUARGA JOKOWI



TIRTO | 7 DESEMBER 2020

Keluarga Pebisnis dan Konglomerat di Balik Bisnis Gibran dan Kaesang

- Kedua putra Presiden Jokowi memiliki sedikitnya 24 perusahaan, mayoritas usaha rintisan. Ada nama keluarga Gandi Sulistiyanto (Direktur Utama Grup Sinar Mas) dan konglomerat TP Rachmat yang menyokong dan terafiliasi dengan bisnis mereka

- Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep tengah membangun usaha induk lewat bendera PT Harapan Bangsa Kita

Kami berdua membesarkan nama kami sendiri tanpa embel-embel orang tua meski orang pasti mengaitkan hal itu," klaim Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. "Kami anggap itu sebagai bonus. Kami berdua tetap kerja keras."

Omongan Gibran itu meluncur dalam satu acara keluarga Presiden Jokowi bersama media di Bogor pada Desember 2018. Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, bersikukuh bisnis mereka bukan dibangun berkat nama besar bapaknya, orang nomor satu di negeri ini.

Namun, melihat perkembangan pesat bisnis keduanya, serta ada beberapa keluarga konglomerat di balik kiprah bisnis mereka, nyaris mustahil menjauhkan faktor anak presiden dari cerita ini.

Baik Gibran maupun Kaesang, dalam catatan kami, memiliki 24 perusahaan. Puluhan bisnis yang mereka bangun sejak 2010 ini mayoritas bermain dalam pasar kuliner, selain sisanya perusahaan rintisan digital dan platform penyokong *startup*.

Baru-baru ini, bisnis kuliner Gibran Rakabuming bernama Mangkok Ku menerima suntikan dana tahap awal (*seed funding*) sebesar 2 juta dolar AS atau setara Rp28,3 miliar dari salah satu firma modal ventura bernama Alpha JWC Ventures. Gibran berkata dana segar ini, di antara hal lain, akan dipakai untuk membuka gerai-gerai baru. Dari langkah bisnis ini, Alpha JWC berhak atas sebagian saham perusahaan.

Mangkok Ku adalah restoran *rice bowl* di bawah bendera PT Pemuda Cari Cuan, dengan Gibran dan Kaesang sebagai komisaris. Dua nama lain di belakangnya adalah juri MasterChef Indonesia Arnold Poernomo dan pengusaha Randy Julius

2009

- **PT Rakabu Sejahtera**

2010

- **Chilli Pari**

2015

- **Markobar**
  PT Martabak Kotta Barat
- **Pasta Buntel**
- **Chakar Dheer**

2016

- **iColor**
  PT Icolor Digital Indonesia
  jasa reparasi produk keluaran Apple
- **Mommilk**

2017

- **Tugas Negara Bos**
  PT Tugas Negara Bos
  menjual produk jas hujan
- **Hompimpa Games**
  PT Among Karsa Indonesia
- **Sang Pisang**
  PT Sang Pisang Indonesia
- **Sang Javas**
  PT Sang Javas Indonesia
  menjual produk t-shirt
- **Madhang**
  PT Madhang Sak Indonesia
  bisnis marketplace makanan rumahan

2018

- **Kerjaholic**
  PT Kerjaholic Inovasi Teknologi
  bisnis aplikasi pencari pekerja lepas & paruh waktu
- **Goola**
  PT Kuliner Global Sejati
- **PT Sang Khadir Indonesia**
- **PT Martabak Anak Bangsa**

2019

- **Mangkokku**
  PT Pemuda Cari Cuan
- **Ternakopi**
  PT Ternak Kopi Indonesia
- **Siap Mas!**
  PT Siap Selalu Mas
  (Kemripik, Ngedrink, Maksor)
- **Enigma Camp**
  PT Enigma Cipta Humanika
- **PT Wadah Masa Depan**
- **Yang Ayam**
  PT Pilar Kuliner Indonesia
- **PT Harapan Bangsa Kita**
  perusahaan akselarasi UMKM
- **Gaaram**

Sumber: Ditjen AHU, Riset, & Reportase Tirto.id

LGS

tirto.id



JEJAK BISNIS KAESANG GIBRAN

Kartadinata, yang menulis dirinya tenaga ahli DPR Komisi Hukum PDI Perjuangan. Randy juga terlibat dalam bisnis makanan ayam goreng bernama Gaaram bersama kedua putra Jokowi itu.

Alpha JWC Ventures juga menginjeksi 5 juta dolar AS (setara Rp70,5 miliar) kepada bisnis Gibran bernama Goola pada 2019. Pada bisnis gerai minuman tradisional ini, Gibran bekerja sama dengan Kevin Susanto, mantan penyanyi rohani cilik, masing-masing menyetorkan saham senilai Rp200 juta dan Rp300 juta di bawah bendera PT Kuliner Global Sejati. Di perusahaan ini juga ada pengusaha muda solo bernama Arif Setyo Budi (saham senilai Rp200 juta); dan Benz Budiman (saham senilai Rp300 juta), CEO *startup advertising tech* bernama Pomona.

Alpha JWC Ventures, yang mengenalkan diri investor untuk *startup* berbasis teknologi, didirikan oleh Jefrey Joe, Will Ongkowidjaja, dan Chandra Tjan pada 2015. Setahun berikutnya, maskapai moda ventura ini menggelontorkan 50 juta dolar AS kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara, sebagian besar di Indonesia, mencakup *startup* seperti Kopi Kenangan, Lemonilo, Tanifund, Tanihub, Kredivo, UangTeman, Style Theory, dan Bobobox.

Alpha JWC bukan satu-satunya entitas investor yang memodali bisnis Gibran dan Kaesang. Penelusuran *Tirto* lewat sedikitnya 36 dokumen perusahaan yang bisa diakses publik, tersedia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ada keluarga-keluarga konglomerat dan pebisnis yang bekerja bareng kedua putra Jokowi itu untuk berdagang di pasar gurih *startup* digital yang ekspansif dalam soal bakar uang.

Keluarga Konglomerat Merapat

Publik umumnya telah mengenal bisnis mebel Presiden Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtra, yang terafiliasi dengan PT Toba Sejahtra milik Luhut Panjaitan. Cerita Jokowi berkongsi bisnis dengan Luhut bermula pada 2007 saat masih menjabat Wali Kota Solo lewat teman satu alumni Fakultas Kehutanan UGM, Bambang Supriyambodo. Di Rakabu, Jokowi telah menempatkan Kaesang Pangarep, anak bungsunya yang kini berumur 25 tahun, sebagai komisaris pemilik 51% saham senilai Rp16,2 miliar.

Namun, berkebalikan dari usaha tradisional bapaknya, Gibran Rakabuming dan Kaesang lebih dikenal sebagai pengusaha beragam bisnis kuliner. Pada 2010, saat berusia 23 tahun, Gibran memulai usaha katering bernama Chili Pari. Pada 2015, kakak-adik ini mendirikan Markobar. Dua tahun kemudian, mereka membangun Sang Pisang. Ketiga bisnis kuliner ini kemungkinan sudah familier.

Gibran dan Kaesang mengklaim bisnis mereka berkembang tanpa ada peran pengaruh politik bapaknya. Namun, dari penelusuran *Tirto*, ada irisan peran Jokowi saat menjabat presiden, mendekatkan kedua putranya dengan sumber-sumber pendanaan yang menggerakkan usaha rintisan makanan dan minuman mereka yang lain.

Irisan pengaruh politik Jokowi dan bisnis anaknya itu bisa dilihat dari perusahaan bernama PT Harapan Bangsa Kita, yang menjadi induk usaha untuk sejumlah bisnis kuliner yang dijalankan oleh Gibran dan Kaesang.

Dikenal sebagai GK Hebat, perusahaan induk berkantor di Generali Tower, kawasan bisnis Gran Rubina, Jakarta Selatan, ini membawahi Sang Pisang, Yang Ayam, Ternakopi, Siap Mas,

Let's Toast, dan Enigma Camp, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

GK Hebat berdiri pada akhir 2019 dari kongsi tiga perusahaan, masing-masing PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang; PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandi Sulistiyanto (Direktur Utama Sinar Mas); dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodore Permadi Rachmat, satu dari 50 orang terkaya di Indonesia. Di GK Hebat, Anthony Pradiptya menjabat direktur dan Kaesang sebagai komisaris.

Anthony Pradiptya, umur 34 tahun, adalah putra Gandi Sulistiyanto. Di PT Wadah Masa Depan, ia menjabat direktur utama, sementara Gibran sebagai komisaris utama dan Kaesang sebagai direktur. Ada juga Wesley Harjono (39), menantu Sulistiyanto, sebagai komisaris. Keluarga Sulistiyanto membangun perusahaan induk dalam bidang energi, infrastruktur, properti, dan digital lewat PT Gan Konsulindo (dikenal juga Gan Kapital) pada 2011.

PT Gan Kapital memakai layar ketiga lewat PT Sinergi Optima Solusindo, unit bisnis strategisnya, dengan memiliki saham senilai Rp50 juta di PT Wadah Masa Depan. Sinergi Optima Solusindo, dalam keterangan website resmi Gan Kapital, adalah perusahaan konsultasi bisnis yang melayani kebutuhan *digital venture*, energi, dan sebagainya. Wesley dan Anthony menjabat direktur dan komisaris di PT Sinergi. Nama Gandi Sulistiyanto muncul sebagai pemegang saham di PT Gan Kapital, bersama kedua anaknya, Anthony (Direktur Utama) dan Edwin Prasetya (Direktur). Sementara Wesley Harjono menjabat Direktur Keuangan.

Sulistiyanto adalah pebisnis yang punya karier bagus di Sinar Mas sejak bergabung pada 1992. Ia menjabat Direktur Utama

Sumber: Ditjen AHU, Riset, & Reportase Tirto.id

LGS

tirto.id

KEKAYAAN GIBRAN

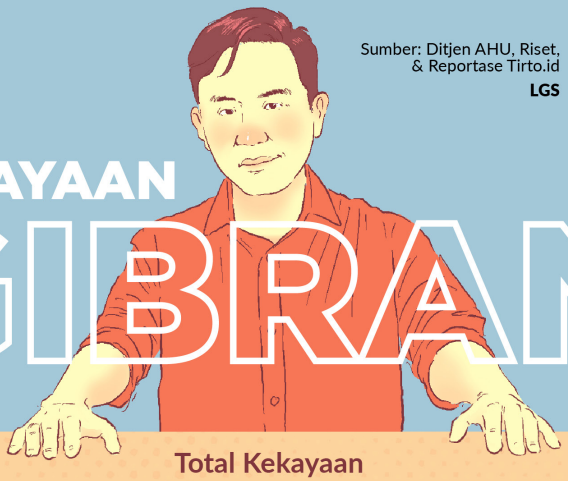

Total Kekayaan

Rp21,15 miliar

5 Bidang Tanah & Bangunan di Sragen & Surakarta

8 Kendaraan Bermotor

5 Mobil

- Mitsubishi Pajero Sport (2016) **Rp350 juta**
- Isuzu Panther (2012) **Rp70 juta**
- Daihatsu Granmax (2015) **Rp60 juta**
- Toyota Avanza (2012) **Rp60 juta**
- Toyota Avanza (2016) **Rp90 juta**

3 Motor

- Royal Enfield (2017) **Rp40 juta**
- Honda CB-125 (1974) **Rp5 juta**
- Honda Scoopy (2015) **Rp7 juta**

Harta Bergerak

Rp260 juta

Harta Lainnya

Rp5,52 miliar

Aset Kas & Setara Kas

Rp2,15 miliar

Utang

Rp895,58 juta

Grup Sinar Mas sejak 2002 dan Wakil Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, organisasi nirlaba keluarga Widjaja, pendiri Sinar Mas. Sinar Mas adalah perusahaan konglomerasi yang punya ratusan unit usaha, dari bisnis bubur dan kertas, sawit, perbankan, sekuritas dan asuransi, telekomunikasi, properti, hingga infrastruktur dan pertambangan batubara. Eka Tjipta Widjaja, yang meninggal dunia dalam usia 98 tahun pada Januari 2019, adalah satu dari lima orang terkaya di Indonesia.

Selain perusahaan keluarga Sulistiyanto, ada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang memiliki saham senilai Rp29,6 juta di PT Wadah Masa Depan. Perusahaan terbuka ini beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara III, Jakarta Pusat. Aldira Sekuritas punya anak usaha bernama PT Surya Timur Alam Raya (STAR Investment) di mana Frenky Loa adalah komisaris utamanya. Frenky Loa juga menjabat komisaris utama di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, perusahaan kemasan kertas dan karton Grup Sinar Mas.

Afiliasi lain, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia memiliki saham senilai Rp10,7 juta di PT Ternak Kopi Indonesia, salah satu usaha rintisan kedua anak Presiden Jokowi.

Sementara konglomerat TP Rachmat atau dikenal Teddy Rachmat memiliki saham senilai Rp9.009.600 melalui PT Gema Wahana Jaya di GK Hebat. Ia pemilik saham mayoritas senilai Rp14,4 miliar di PT Gema Wahana Jaya, dan putra sulungnya, Christian Ariano Rachmat, pemilik saham senilai Rp1 juta. Putra keduanya, Arif Patrick Rachmat, menjabat komisaris di perusahaan tersebut.

Ariano Rachmat, yang juga Wakil Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk., tidak merespons upaya konformasi *Tirto* untuk bertanya tentang alasan di balik dia, ayahnya, dan saudara

kandungnya berminat berinvestasi pada perusahaan anak Jokowi, hingga laporan ini dirilis.

Dari Kunjungan Presiden Jokowi ke Markas Plug and Play

Agaknya butuh tiga tahun untuk memantapkan bisnis-bisnis rintisan kedua putra Presiden Jokowi ke dalam satu induk PT Harapan Bangsa. Cerita ini dimulai pada Februari 2016.

Pada pertengahan Februari 2016, Presiden Jokowi berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator *startup* yang berpusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meminta Plug and Play mengembangkan *startup* dan investasi di Indonesia, sejalan ambisi pemerintahannya berekspansi ke sektor *e-commerce*.

Sembilan bulan kemudian, atau 15 November 2016, CEO Plug and Play Saeed Amidi menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, berkata Presiden Jokowi meminta agar saat investasi di Indonesia, Plug and Play membuat perusahaan patungan di Indonesia. "Jadi ada *venture capital* di luar negeri, nanti uangnya yang masuk."

Itu sudah dilakukan dua hari sebelumnya: Plug and Play bermitra dengan Gan Kapital untuk menunaikan harapan Jokowi.

Maka, saat Saeed Amidi bertemu dengan Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji membangun 50 perusahaan rintisan tiap tahun di Indonesia, ia ditemani Direktur Utama Plug

and Play Indonesia Wesley Harjono, CEO Gan Kapital Anthony Pradiptya, dan Direktur Utama Grup Sinar Mas Gandi Sulistiyanto.

Kongsi dagang tersebut memakai PT Gan Inovasi Solusindo, di dalamnya ada PT Gan Inovasi Digitalindo dan Plug and Play Singapore Pte Ltd, masing-masing menyetor saham senilai Rp3,25 miliar. Wesley Harjono dan Anthony Pradiptya menjabat direktur utama dan komisaris di perusahaan ini.

Adapun pemilik saham terbesar di PT Gan Inovasi Digitalindo adalah PT Buana Mas Sejahtera, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk., induk usaha Sinar Mas dalam bidang energi dan infrastruktur. Kedua perusahaan ini berkantor di Menara II Sinar Mas Land Plaza, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Franky dan Indra Widjaja berada dalam dewan komisaris di perusahaan berkode emiten DSSS tersebut.

Lewat *brand* GK Plug and Play Indonesia inilah, PT Harapan Bangsa (GK Hebat) juga berperan sebagai platform akselerator bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Tujuannya, demikian informasi dalam situs resmi perusahaan, "berupaya menciptakan solusi digital pada aneka macam industri dan memberi korporasi pada akses langsung ke *startup* sejak tahap awal."

Tirto bertanya kepada Stephanie Susanto, *corporate communication* Sinar Mas, mengenai afiliasi anak usaha Sinar Mas dengan GK Hebat, yang menopang sejumlah bisnis rintisan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Apakah murni bisnis atau faktor putra presiden?

Stephanie menjawabnya sebagai kemitraan bisnis semata. "GK Hebat ini, kan, salah satu unit usahanya ada yang bergerak di bidang agregator UMKM, di mana mitra usahanya adalah Kaesang. Kemitraan mereka murni bisnis. Dan banyak mitra lain

Sumber: Ditjen AHU, Riset, & Reportase Tirto.id

LGS

tirto.id

PT Gan Kapital

- **Komisaris** Susan Dwi Meylani Gan
  saham **Rp7,9 miliar**
- **Direktur Utama** Anthony Pradiptya Gan
  saham **Rp7,9 miliar**
- **Direktur** Edwin Prasetya Gan
  saham **Rp7,9 miliar**
- Gandi Sulistiyanto Soeherman
  saham **Rp15,9 miliar**
- Susi Ardhani
  saham **Rp13,25 miliar**

PT Sinergi Optima Solusindo

- **Direktur** Wesley Harjono
- **Komisaris** Anthony Pradiptya Gan
- Henny Susanti
  saham **Rp30 juta**
- PT Gan Kapital
  saham **Rp22,47 miliar**

PT Wadah Masa Depan

- **Komisaris Utama** Gibran Rakabuming
  saham **Rp25 juta**
- **Komisaris** Wesley Harjono
- **Direktur Utama** Anthony Pradiptya Gan
- **Direktur** Kaesang Pangarep
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
  saham **Rp29,6 juta**
- PT Sinergi Optima Solusindo
  saham **Rp50 juta**

PT Siap Selalu Mas

- **Komisaris** Gibran Rakabuming
  saham **Rp26 juta**
- **Direktur** Kaesang Pangarep
  saham **Rp24 juta**

PT Gema Wahana Jaya

- **Komisaris** Arif Patrick Rachmat
- **Direktur** Rawal Timur Lasut
- T.P. Rachmat
  saham **Rp14,404 miliar**
- Christian Arianto Rachmat
  saham **Rp1 juta**

PT Harapan Bangsa Kita
(GK Hebat)

- **Komisaris** Kaesang Pangarep
- **Direktur** Anthony Pradiptya Gan
- PT Wadah Masa Depan
  saham **Rp161 juta**
- PT Siap Selalu Mas
  saham **Rp151 juta**
- PT Gema Wahana Jaya
  saham **Rp9 juta**

> ***Anthony Pradiptya Gan*** & ***Wesley Harjono*** adalah anak & menantu ***Gandi Sulistiyanto***, *managing director* Sinarmas Group

> ***Arif Patrick Rachmat*** & ***Christian Arianto Rachmat*** adalah putra ***T.P. Rachmat***, pendiri Triputra Group & eks bos Astra Group. Keduanya pucuk pimpinan perusahaan keluarga ini. Christian Arianto juga direksi PT Adaro Energy

KONGLOMERAT DI BALIK BISNIS

KAESANG GIBRAN

yang tidak ada kaitan dengan Kaesang," katanya pada pekan pertama Desember 2020.

Direktur GK Hebat, Anthony Pradiptya, putra Gandi Sulistiyanto, menjawab kepada *Tirto* bahwa bisnis yang dibangun bersama anak Jokowi berdasarkan visi dan misi. Ia membantah sedang membangun kerajaan bisnis dengan anak-anak Presiden Jokowi.

"Kalau visi dan misinya bagus, bisnis modalnya bagus, bisnisnya besar, itu hanya akibat. Tapi, sebabnya kesamaan visi dan misi. Kalau jadi besar, *alhamdulillah*," kata Anthony.

Di bawah Naungan PT GK Hebat

Wesley Harjono, menantu Gandi Sulistiyanto, menulis: "Suatu kebanggaan besar untuk Plug and Play Indonesia bisa dipercaya Bapak Presiden Jokowi untuk membangun ekosistem *startup* di tanah air." Ucapan itu diunggah di media sosialnya bersama foto bareng Presiden Jokowi dalam acara 'Young on Top National Conference' pada Agustus 2018. Di acara yang sama, Wesley juga mengunggah video pendek pidato Jokowi.

Jokowi berkata alasanya meminta Plug and Play dibawa ke Indonesia "untuk membangun ekosistem [di mana] kita harus punya inkubasi, punya inkubator, untuk melepas *startup* biar jadi *unicorn-unicorn* yang semakin banyak di Indonesia."

Dua bulan kemudian, Wesley berfoto bersama Kaesang. Lalu pada Desember 2018, ia mengunggah foto duduk di samping Presiden Jokowi pada acara Digital Startup Connect. Pada bulan yang sama Wesley dan Anthony berfoto bersama Gibran dan Kaesang di Cerita Cafe, Kampung Melayu, Jakarta Timur, sambil

berujar: "Senang sekali bisa *sharing* dan saling belajar mengenai berwirausaha dari anak-anak muda yang hebat ini."

Dari apa yang disebut "kepercayaan" dan "sharing" itulah terbentuk PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat). Di bawah naungan induk usaha inilah, mereka menjalin bisnis lewat beberapa anak usaha, antara lain PT Pilar Kuliner Indonesia (Yang Ayam), PT Martabak Anak Bangsa, PT Sang Pisang Indonesia, PT Ternak Kopi Indonesia, dan PT Enigma Cipta Humanika (Enigma IT Bootcamp).

Direktur Pemasaran PT Harapan Bangsa Kita, Ansari Kadir, yang juga bersama Kaesang mendirikan PT Sang Khadir Indonesia, mengatakan kepada *Tirto* bahwa berkat *merger* dengan PT Gan Kapital, usaha induk keluarga Gandi Sulistiyanto, mereka mendapatkan suntikan dana. "Akhirnya ada investasi awal yang kita kembangkan bersama," katanya. Ia berkata GK Hebat diresmikan pada akhir 2019 dan beroperasi sejak 2020.

Salah satu akses dari relasi bisnis ini adalah pelatihan yang diadakan Enigma IT Bootcamp disponsori oleh Eka Tjipta Foundation, lembaga nirlaba keluarga pendiri Sinar Mas. Pelatihan IT bagi lulusan SMK ini diadakan pada 3 Februari 2020, menyeleksi 18 dari 1.582 pendaftar, untuk "magang" selama dua bulan di salah satu anak usaha pertambangan Sinar Mas demi menghasilkan "programmer siap kerja" dan punya "kompetensi tambahan". Setelah lulus, mereka "mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan kami," kata Direktur Organisasi dan Pengembangan Sinar Mas Energy & Infrastructure, Mochtar Suhadi.

Melibatkan pelaku industri untuk "menemukan model kerja sama baru" dengan lulusan pendidikan vokasi adalah keinginan Presiden Jokowi, setidaknya sejak 2016 sampai ucapan terbarunya

pada Agustus 2020 ketika meresmikan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang didukung oleh Sinar Mas dan Astra.

"Kita bukan hanya *create* UMKM, tapi secara digital *create* personal untuk dunia kerja," kata Ansari Kadir menanggapi pertanyaan *Tirto* mengenai bisnis Enigma Camp.

Akses ke sumber-sumber pendanaan juga diterima Ternakopi, yang terpilih satu dari 17 startup dalam angkatan keempat program akselerator GK-Plus and Play Indonesia pada April 2019, sehingga menerima pendanaan tahap awal (seed funding).

"*Seed funding* hanyalah sebagian kecil dari investasi yang kami berikan. Lebih dari itu, kami dapat menjembatani startup dengan corporate partner untuk saling kerja sama saling menguntungkan agar startup berkembang lebih cepat," ujar Wesley Harjono pada 2018.

'Tidak Ada Makan Siang Gratis'

Tirto meminta komentar kepada Nailul Huda, peneliti ekonomi digital dan inovasi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengenai relasi bisnis antara Gibran dan Kaesang, yang bukan cuma pengusaha kuliner tapi juga anak Presiden Jokowi, dengan pengusaha-pengusaha yang sudah *establishment* tersebut.

Huda berkata bahwa ia lebih condong menilai "tidak ada makan siang gratis" dari relasi bisnis tersebut.

"Kalau tidak melihat sisi ekonomi-politiknya, *startup* bisnis yang dimiliki atau dikelola secara bersama oleh Gibran dan Kaesang merupakan *startup* bisnis seperti biasa." Artinya, mereka

akan membutuhkan suntikan modal untuk bisa terus beroperasi maupun berekspansi. Usaha-usaha rintisan ini adalah model bisnis yang dikenal doyan bakar uang ini, meskipun sudah membuka beberapa cabang di kota-kota Indonesia.

"Kalau cuman mengandalkan brand 'bisnis anak presiden' terus *invest*, ya bisa jadi hanya upaya untuk mendekati presiden," kata Huda.

Sila lihat jejaring bisnis Gibran dan Kaesang di sini

TIRTO | 8 DESEMBER 2020

Jejak Bisnis Bobby Nasution

- Bisnis properti Bobby Nasution terafiliasi dengan politikus lokal di Sumatera Utara dan perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara

- Bobby Nasution, 29 tahun (yang memenangkan pemilihan Wali Kota Medan) memiliki kekayaan Rp54,86 miliar

Di Binjai, sebuah kota di pinggiran barat Sumatera Utara, tak banyak yang tahu bahwa Muhammad Bobby Afif Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, ternyata pemilik Veteran Café, warung kopi yang berdiri sejak 2013. Kabar itu baru santer terdengar ketika Bobby mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan pada Desember 2019. Binjai lebih dikenal sebagai kota persinggahan karena diapit Medan dan jalur lintas Sumatera menuju Aceh.

Veteran Café, terletak di samping kantor Wali Kota Binjai, kini diklaim Bobby sebagai bisnis kuliner pertama yang ia bangun, juga salah satu bisnis yang dirintisnya sebelum menjadi menantu Presiden Jokowi pada 2017.

Sejak 2018, Veteran Café tak lagi jadi satu-satunya usaha Bobby di Binjai.

Bobby memiliki saham sebesar Rp9,3 miliar sekaligus komisaris di PT Wirasena Cipta Reswara. Perusahaan ini memiliki saham sebesar Rp1,53 miliar di PT Pilar Wirasena Sinergi, yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai. PT Pilar bergerak di bidang pertanian, yang produknya adalah beras. Meski Binjai bukan kota pertanian, dan diakui Wali Kota Binjai Muhammad Idaham tak punya lahan sawah padi yang luas bahkan terus berkurang setiap tahun, itu tak menyurutkan Bobby berinvestasi di sana.

Dalam acara buka puasa bersama Idaham pada Juni 2018, Bobby mengungkap PT Pilar Wirasena Sinergi merupakan bagian dari PT Wirasena Cipta Reswara.

Di PT Pilar, Muhammad Andri Alfisah, putra pertama Idaham, adalah pemilik saham sebesar Rp630 juta dan menduduki komisaris. Andri Alfisah merupakan anggota DPRD provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat (2019-2024). Idaham telah

menjabat Wali Kota Binjai selama dua periode. Keluarga ini tengah membangun dinasti politik di mana istri Idaham, Lisa Andriani, bertarung sebagai Calon Wali Kota dalam Pilkada Kota Binjai 2020.

Dipinang Pengusaha Properti

Sebelum menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi, Bobby dipinang Takke Group, perusahaan properti asal Tanjung Pinang, sebagai Direktur Pemasaran. Bobby mengaku mengenal Direktur Takke Group, Laurence M Takke, melalui ayahnya, Erwin Nasution, eks Direktur PTPN IV.

"Jadi, sebelum bergabung dengan Takke Group, saya sudah lebih dulu berbisnis properti pada 2011. Awalnya renovasi rumah untuk dijual kembali. Lalu bangun satu-dua, hingga terlibat dalam proyek [apartemen] Malioboro City di Yogyakarta," klaim Bobby pada September 2017.

Nama Takke Group belum sementereng gergasi properti macam Ciputra Group atau Agung Podomoro Group. Tapi, di balik minim aktivitas publikasinya, ada beberapa proyek bernilai sekitar Rp2 triliun yang dirampungkan Tekke Group. Ini antara lain apartemen Kemang View dan Metro Galaxy di Bekasi, juga sejumlah perumahan tapak seperti Cimanggis Permai yang jika diakumulasikan telah membangun sekitar 8.000 unit. Dalam arsip berita pada Juli 2019, CEO Tekke Group, Laurence M Tekke, mengungkap ketertarikan bekerja sama dengan pemerintahan Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

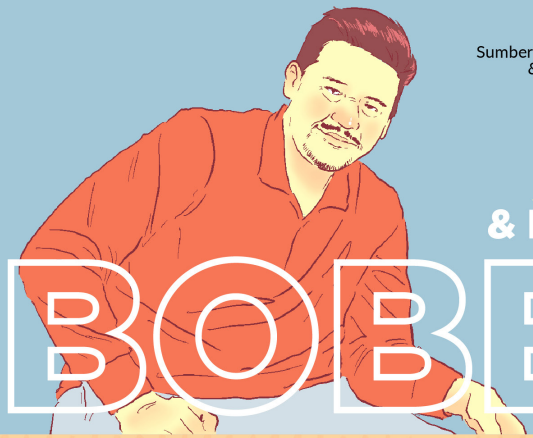

Sumber: Ditjen AHU, Riset, & Reportase Tirto.id

LGS

tirto.id

BISNIS & KEKAYAAN BOBBY

Total Kekayaan
Rp54,86 miliar

Aset Properti Rp34,17 miliar

4 Aset Tanah

- **3** Tanah di Medan
- **1** Tanah di Surakarta

4 Aset Tanah & Bangunan

- **3** Rumah di Jakarta Selatan
- **1** Rumah di Deli Serdang

6 Mobil Rp1,26 miliar

Aset Kas & Setara Kas Rp8,92 miliar

PT Wirasena Cipta Reswara
Komisaris
saham **Rp9,3 miliar**

PT Sahabat Jaya Reswara
saham PT Wirasena Cipta Reswara **Rp650 juta**
saham Bobby **Rp350 juta**

- **Nov 2019** Digugat PT Glostar Indonesia, aktivitas *cut & fill* tidak ditunjang sarana & prasarana memadai
- **Jan 2020** PT GSI kalah gugatan

PT Pilar Wirasena Sinergi
saham PT Wirasena Cipta Reswara **Rp1,53 miliar**
saham Muhammad Andri Alfisah **Rp630 juta**

Muhammad Andri Alfisah adalah putra Walikota Binjai. Ibu Andri Alfisah tercatat sebagai calon Walikota Binjai periode berikutnya.

PT Sambas Mineral Mining
saham PT Wirasena Cipta Reswara **Rp5,7 miliar**

- **2018** Pembangunan smelter PT SMM dievaluasi karena lambat
- **Mei 2020** Memecat 3 karyawan yang dianggap melanggar UU Naker
- **Okt 2020** Satpam PT SMM ditemukan meninggal di kawasan perusahaan, diduga kecelakaan

Proyek Perumahan Subsidi di Sukabumi

PT Wirasena Cipta Reswara, perusahaan properti Bobby beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat diributkan publik saat memenangkan proyek rumah bersubsidi pemerintah di Sukabumi, Jawa Barat. Kemenangan atas tender ini dianggap tak lepas dari status dia sebagai menantu Presiden. Tudingan ini dibantah Bobby.

Proyek perumahan program Nawacita Sukabumi Sejahtera Satu itu diresmikan Bobby Nasution pada 21 Januari 2019. Proses pembangunan oleh perusahaan diprotes warga karena menyebabkan lingkungan sekitar terdampak limbah lumpur.

PT Glostar Indonesia, yang berdiri di kawasan terdampak, sempat melayangkan gugatan ke pengadilan pada November 2019. Alasannya, dalam aktivitas *cut and fill*, PT Wirasena Cipta Reswara tidak ditunjang sarana dan prasarana memadai. Saat hujan tiba, material tanah dan lumpur menerjang dan merusak kawasan pabrik PT Glostar. Namun, pada Januari 2020, PT Glostar kalah di pengadilan.

"Sekarang kami fokus ke menyelesaikan masalah internal saja supaya mengurangi kerugian," kata Humas PT Glostar, Nurzaman, saat dikontak *Tirto*. "Kami membenahi sendiri saja biar kerugian karena lumpur yang masuk enggak makin banyak."

Nurzaman berkata Pengadilan Negeri Cibadak menolak tuntutan PT Glostar dengan alasan gugatan seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang jadi lokasi kantor perusahaan Bobby tersebut.

Terafiliasi dengan Perusahaan Tambang di Konawe

PT Wirasena Cipta Reswara terafiliasi dengan PT Sambas Minerals Mining, perusahaan pertambangan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia pemegang saham terbesar kedua senilai Rp5,7 miliar di PT Wirasena. Haji Anton Tarigan adalah Direktur Utama PT Sambas Minerals Mining dan PT Wirasena.

Sila lihat jejak bisnis Bobby Nasution di sini

KEKUASAAN

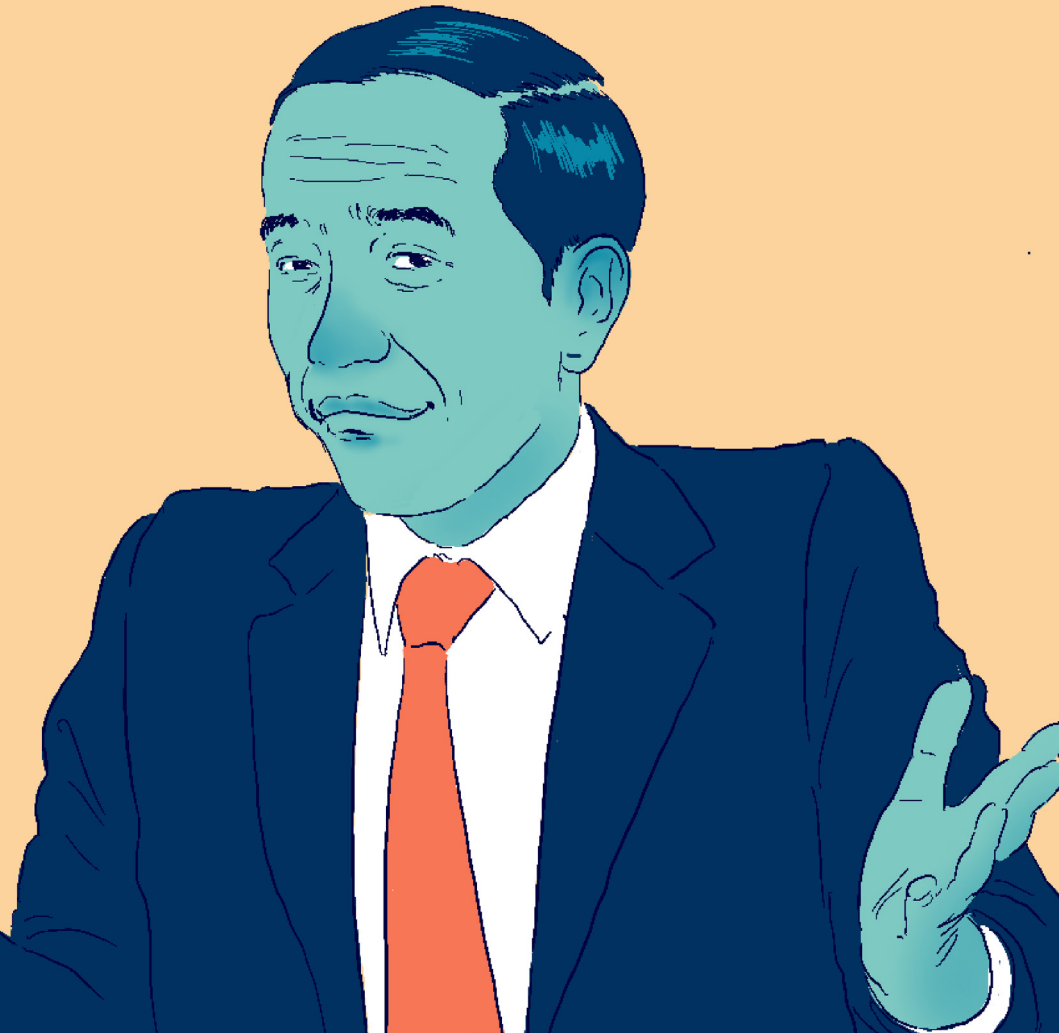

TIRTO | 11 DESEMBER 2020

Oligarki Kian Mencengkeram dan Demokrasi Makin Semu

- Jokowi tidak memandang demokrasi sebagai ihwal yang harus diperjuangkan. Baginya, demokrasi hanya alat untuk memenangkan pemilu

- Di bawah Jokowi, demokrasi Indonesia pasca Orde Baru mengalami kemunduran sampai titik terendah

Joko Widodo adalah sosok yang patuh kepada ibunya. Jika ibunya, Sujiatmi Notomihardjo, berkata tidak, Jokowi akan menurutinya. Ketiga saudaranya juga demikian. Maka, ketika Jokowi berniat maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005, ia juga mendatangi sang ibu untuk menyatakan keinginan besarnya itu.

"Saya sudah siap mengabdi, Bu," kata Jokowi seperti dicatat dalam *Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi* (2014) yang ditulis Fransisca Ria Susanti & Kristin Samah.

Tapi Sujiatmi tak pernah membayangkan anaknya akan menjadi wali kota, apalagi presiden. Justru kakek Jokowi, Wirorejo, yang pernah "meramal" bahwa cucunya akan menjadi tumpuan keluarga.

"Bocah berkepala besar itu pasti jadi orang," kata Wirorejo sebagaimana diingat Sujiatmi saat Jokowi berusia 4 tahun.

"Ramalan" Wirorejo seperti terbukti puluhan tahun kemudian. Jokowi saat ini bukan hanya jadi tumpuan keluarga. Dia sudah menjelma sebagai tumpuan seluruh masyarakat Indonesia.

Tapi, "jadi orang" seperti apakah Jokowi setelah ucapan kakeknya 55 tahun silam?

***

Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara, akan saya lakukan," kata Joko Widodo dalam kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Frasa "tanpa beban" ini menjadi andalan Jokowi untuk meyakinkan rakyat bahwa ia bisa melawan desakan para elite politik dan menjalankan administrasi yang bekerja maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Janji itu sebenarnya bukan kali pertama. Lima tahun sebelumnya, pada debat capres-cawapres 2014, satu pertanyaan penting yang diungkap publik kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla adalah bagaimana pemimpin negara bebas dari tuntutan partai dan menghindari perilaku koruptif?

Jawaban Jokowi: "Sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerja sama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kami ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan, tapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kita adalah kerja sama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi."

Ketika Kabinet Kerja diumumkan pada Oktober 2014, 16 orang berasal dari partai politik dan 18 lain dari profesional non-partai. Status non-partai ini pun sebenarnya tak sepenuhnya murni. Sedangkan orang-orang yang berjasa kepada Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 mendapatkan posisi strategis.

Andrinof Chaniago, Ketua Tim Sukses Jokowi 2014, menjadi Kepala Bappenas; Amran Sulaiman, salah satu donatur terbesar Jokowi-JK, menjadi Menteri Pertanian; Andi Widjajanto, seorang pemikir di tim kampanye, menjadi Sekretaris Kabinet; Luhut Binsar Panjaitan, *konco* lawas Jokowi, sampai rela keluar dari Partai Golkar.

Jokowi bersikeras mengklaim tidak menerapkan politik balas budi atau bagi-bagi jatah. Baginya, yang terjadi adalah sebuah kalkulasi matang. Bagaimanapun pemerintahannya membutuhkan dukungan partai politik agar bisa terlaksana dengan baik.

Tapi, komposisi menteri yang diberikan kepada parpol sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan Jokowi-JK memang membagi-bagi jabatan secara "adil" kepada partai pendukung. Pada akhir periode mereka, jumlah total menteri dari partai ada 14 berbanding 20 dari non-partai.

Komposisi menteri Jokowi-JK ini seperti memastikan bahwa mengutamakan kepentingan rakyat di atas elite hanyalah jualan kampanye.

Pada periode kedua kepresidenannya, Jokowi beralih dari kabinet ramping menjadi kabinet gemuk. Alasannya, dia ingin melakukan akomodasi semua kepentingan yang, sekali lagi, mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tidak cukup enam partai di parlemen mendukungnya. Jokowi, yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin, menambah Partai Gerindra sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Dengan komposisi ini, pembagian menteri tak jauh beda dengan sebelumnya. PDIP sebagai pemenang mendapat jatah empat menteri; disusul Partai Golkar (minus Luhut Panjaitan), PKB, dan Partai Nasdem dengan tiga menteri; kemudian Partai Gerindra dua menteri, dan PPP satu menteri. Selain itu, Jokowi membagi-bagi posisi pejabat negara kepada tim sukses termasuk relawannya yang bergabung dalam pemenangan Pilpres 2019.

"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong," kata Jokowi di Istana Kepresidenan 24 Oktober 2019.

Yuki Fukuoka dan Luky Djani, pada artikel yang diterbitkan dalam South East Asia Research berjudul 'Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or An Oligarchic Adaptation

of Post-clientelist Initiatives?' (2016), menganggap sejak awal Jokowi sudah bukan lagi sosok yang ia citrakan ke publik selama kampanye: mengutamakan kepentingan rakyat di atas partai.

"Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, presiden baru Indonesia, Jokowi, mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Berkebalikan dengan janji kampanye tentang pemerintahan yang 'bersih' dan 'profesional' tanpa tukar guling, Jokowi memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukungnya," tulis mereka.

Di sisi lain, politik balas budi ini bisa jadi salah satu cara ampuh Jokowi memuluskan kekuasaannya. Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute, mengambil contoh langkah Jokowi merangkul Prabowo. Baginya, upaya itu adalah pengkhianatan kepada demokrasi. Dengan diambilnya Prabowo, otomatis Partai Gerindra akan mendukung pemerintahan Jokowi; lantas siapa yang bisa menjadi oposisi yang "seharusnya ada dalam sistem demokrasi?"

"Ketika dia memilih Prabowo [sebagai Menteri Pertahanan], artinya sudah selesai," kata salah satu pejabat kepada Bland seperti dikutip dalam *Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia* (2020). "Dia melakukan itu untuk melumpuhkan oposisi."

Bagian dari Oligarki

Wajar jika pada awal kemunculannya dalam gelanggang politik nasional, Jokowi menjadi pengharapan kelompok sipil dan aktivis. Yuki Fukuoka dan Luky Djani berargumen, setelah

Orde Baru tumbang, kelompok masyarakat tercerai-berai. Akibatnya, pemegang kekuasaan masih tidak bisa jauh-jauh dari oligarki rezim lawas.

Bedanya, kemunculan kelompok buruh dan aktivis, turut menjadikan elite politik di era pasca-Orde Baru mempertimbangkan kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagaimanapun, suara mereka diperlukan untuk memenangkan pemilu. Mereka juga berani menyuarakan lebih banyak tuntutan dibandingkan masa sebelumnya sehingga praktik klientelistik ala Orba menemui tantangan berat.

Para elite politik tidak lagi mengandalkan patronase demi memenangkan kontestasi pemilu. Mereka mulai mendukung tokoh yang punya narasi peduli pada rakyat miskin dan berani memaparkan program-program populis. Tokoh seperti ini lazimnya muncul di periode demokratis setelah tumbangnya otoritarianisme yang melanggengkan praktik klientelistik.

Fukuoka dan Djani berpendapat, "Ketika mobilisasi klientelistik menjadi kurang efektif, elite oligarki mulai selektif merangkul populisme dalam usaha mempertahankan cengkeraman pada struktur kekuasaan negara." Dalam hal ini, pemimpin yang merakyat dan muncul dari luar tatanan Orde Baru menjadi sarana bagus untuk melakukan kooptasi.

Jokowi bukan seorang politikus yang tumbuh di masa Orde Baru. Dia putra seorang tukang kayu yang menanjak jadi pengusaha lokal sukses dan kemudian menjadi pejabat publik. Dia punya banyak inovasi dan menyelesaikan berbagai masalah di kotanya. Reputasi Jokowi mengalahkan banyak elite politik yang sudah terstigma korup dan tidak peduli pada rakyat.

Selanjutnya adalah sejarah. Jokowi kemudian didukung oleh Prabowo dari Partai Gerindra dan Megawati dari PDIP, sampai akhirnya PDIP mengusungnya sebagai presiden.

PDIP, yang besar karena dianggap sebagai antitesis Orde Baru pada awal era Reformasi, sebenarnya merupakan bagian dari oligarki masa kini. Dukungan PDIP kepada Jokowi bukan karena kesadaran ideal bahwa eks Wali Kota Solo itu adalah pemimpin terbaik untuk rakyat, tapi lantaran Jokowi adalah pilihan terbaik untuk menang. Bahkan hingga 2009, Megawati masih menginginkan Prabowo untuk menjabat di pemerintahan.

Jalan cerita itu dimaknai lebih dalam oleh Jeffrey A. Winters, Direktur Buffet Institute of Global Affairs, dalam riset berjudul "Oligarchy and Democracy in Indonesia" (2013). Menurut Winters, Jokowi adalah produk oligarki.

"Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendoronganya menuju kemenangan. Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput," kata Winters.

Jokowi berhasil menang pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 karena partai politik dan kaum elite memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah menyebut oligarki seperti ini hanya menguntungkan

kelompok lingkaran penguasa. Para regulator di sekitar kekuasaan adalah pebisnis yang, tentu saja, membuat peraturan hanya untuk menguntungkan kelompok mereka, bukan dari masyarakat kecil dan menengah seperti yang selama ini Jokowi citrakan.

JATAM mencatat, baik orang dekat Jokowi maupun pimpinan DPR, punya usaha yang berhubungan dengan tambang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan PT Toba Sejahtra. Ketua DPR Puan Maharani punya suami yang aktif di Odira Energy Karang Agung dan PT Rukun Raharja. Sementara Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi Komisaris PT Sinar Kumala Naga.

Merah menganggap aturan yang belakangan ditetapkan, seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja dan UU Minerba (semuanya tahun 2020 saat masyarakat menghadapi pandemi COVID-19), juga hanya menguntungkan Jokowi serta kelompoknya.

"Benturan kepentingan ini yang ditunjukkan oleh relasi bisnis atau temali bisnis antara keluarga Jokowi atau keluarga Luhut. Relasi bisnis ini berkelindan dengan relasi politik," ucap Merah kepada *Tirto*.

Sementara Ben Bland menilai Jokowi melakukan lebih banyak kompromi ketimbang melawan kepentingan pelbagai pihak. Kepemimpinan Jokowi sebenarnya berantakan. Dia tidak punya filosofi politik yang jelas "Jokowi tidak pernah menjadi seorang reformis demokrasi seperti yang pendukungnya pikirkan," tulis Bland dalam bukunya.

Jokowi hanya mengikuti situasi yang terjadi di sekelilingnya. Pendeknya, dia tidak punya agenda dan visi sendiri terhadap demokrasi dan berbagai situasi di sekitarnya. Ketika ada gerakan

Sumber: Riset Tirto.id
LGS

tirto.id



> 5 tahun ke depan, mohon maaf,
> saya sudah enggak ada beban.
> Saya sudah enggak bisa nyalon lagi.
> Jadi, apa pun yang terbaik
> untuk negara, akan saya lakukan
>
> **Jokowi,** *Kampanye Pilpres 2019*

Apa yang Kita Bicarakan Ketika Kita Membicarakan Presiden Jokowi

2014-2019

37%

207 dari **560** kursi

Koalisi Kekuasaan di DPR

2019-2024

74,2%

427 dari **575** kursi

Mengonsentrasikan Para Jenderal Militer

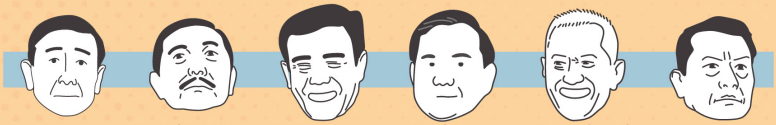

Wiranto | Luhut B. Panjaitan | Fachrul Razi | Prabowo Subianto | Ryamizard Ryacudu | Moeldoko

Merangkul Polisi & Membiarkan Jadi Alat Represi

- Demo Tolak Hasil Pemilu di Bawaslu, *Mei 2019*
- Protes Anti-Rasisme di Papua, *Agustus-September 2019*
- Demo Reformasi Dikorupsi, *September 2019*
- Demo Tolak Omnibus Law, *Oktober 2020*



- **Menempatkan sejumlah pejabat TNI & Polisi di Pos Sipil**
- **Menempatkan puluhan relawan pendukung Jokowi menjadi pejabat negara**
- **Menciptakan industri *buzzer***

dari kelompok Islam politik yang berusaha menjatuhkan dirinya, dia menarik Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Saat ada demonstrasi besar-besaran dari pendukung Prabowo yang berujung ricuh, dia menjalin koalisi bersama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Semuanya bersifat responsif. Tanpa ide cemerlang, tanpa solusi matang.

Narasi populis Jokowi sebagai capres berlatar belakang sipil yang berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu berhasil mengalihkan dukungan masyarakat dari Prabowo yang berlatar belakang militer dan punya masalah pelanggaran HAM.

Pada 2016, Jokowi makin membuktikan diri sebagai pemimpin populis semu. Dia melantik Wiranto, bekas Panglima ABRI yang diduga terlibat pembantaian orang-orang Timor Leste. Keputusan ini menuai kritik dari para pegiat HAM. Sepanjang 2016-2019, Wiranto menjadi simbol ketidaktegasan Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tapi Jokowi tampak tak keberatan dilabeli sebagai presiden yang ingkar janji dan tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Marcus Mietzner, peneliti dari Australia, mencatat Jokowi berhasil naik karena penurunan demokrasi dan situasi politik yang stagnan membuat masyarakat merindukan sosok populis pro-demokrasi. Tapi justru di tangan Jokowi pula demokrasi mengalami penurunan.

Perkataan Jokowi yang mendaku sebagai "wong cilik" dan "sekarang waktunya melakukan sesuatu bagi wong cilik" seperti omong kosong belaka. Sejak masuk ke gelanggang politik nasional, dia adalah bagian dari oligarki.

Dekati Militer, Rangkul Polisi

Leonard C. Sebastian dan kawan-kawan dalam 'Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period' (2018) menilai Jokowi sebagai presiden berlatar belakang sipil kelabakan menjaga kekuasaannya. Pilihan dia akhirnya menyandarkan diri kepada kelompok militer.

"Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan militer mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah memastikan jalannya kebijakan pusat di daerah-daerah terpencil," tulis Sebastian dan kawan-kawan.

Banyak orang kepercayaan Jokowi berasal dari kalangan serdadu. Di posisi Kepala Staf Kepresidenan ada mantan Panglima TNI Moeldoko. Posisi Menko Maritim dan Investasi ada Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Kesehatan ada Terawan Agus Putranto.

Ketika Menteri Kesehatan dianggap inkompeten menangani pandemi COVID-19 sepanjang 2020, Jokowi tetap mempertahankan Terawan meski banyak sekali pihak yang mendesak agar dokter militer itu segera diganti. Sedangkan Moeldoko merupakan salah satu dari tiga orang istimewa yang omongannya bisa dianggap mewakili Jokowi. Dan Luhut Binsar Panjaitan, semua orang tahu siapa dia.

Luhut adalah salah satu menteri yang mengenal Jokowi paling lama. Hubungan mereka bukan sebatas pemerintahan, tapi juga bisnis. Luhut mengaku kenal Jokowi sejak 2007. Padahal kala itu Pada 2009 nama PT Toba Bara Sejahtra, perusahaan Luhut, tercantum sebagai pemilik saham minoritas di PT Rakabu

Sejahtra. Lima tahun kemudian, Luhut selalu menempel dengan Jokowi.

Luhut tak pernah absen dalam pemerintahan Jokowi kendati posisinya terus berganti. Dia pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Staf Kepresidenan; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Perhubungan (Plt); Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan, yang paling gres, Menteri Kelautan dan Perikanan (Plt)—sebelum digantikan Syahrul Yasin Limpo. Jokowi juga meminta Luhut menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Antonius Made Tony Supriatma, menulis makalah berjudul "Jokowi and His Generals: Appeasement and Personal Relations" pada 2019. Dalam tulisannya, Supriatma memandang Jokowi adalah orang yang sangat menghargai kedekatan dan loyalitas, tidak terkecuali pada kelompok militer. Sikap Jokowi ini melanggengkan kebiasaan militer akrab dengan politikus sipil untuk bisa mendapatkan jabatan tertentu.

"Kepemimpinan Jokowi menunjukan kecenderungan ini (bagi-bagi jabatan berdasarkan kedekatan) dan dia menunjuk orang-orang yang dia kenal baik, telah bekerja bersama dia, atau yang terbukti loyal kepadanya," tulis Supriatma.

Jokowi tak cuma menempatkan militer di kekuasaan, tapi juga menyulap polisi jadi tukang gebuk bagi kepentingan pemerintah. Ketika mendapat kritik, Jokowi dianggap sering kali membiarkan polisi mengambil alih.

Polisi di era pemerintahan Jokowi melakukan represi gila-gilaan kepada para demonstran 'Reformasi Dikorupsi', protes

anti-rasisme Papua, juga aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Polisi juga melakukan patroli siber dengan memata-matai aktivitas kelompok sipil progresif di kanal-kanal media sosial, juga menangkap para aktivis, salah satunya Ravio Patra.

Setelah Jokowi-Ma'ruf menjabat setahun, hasil jajak pendapat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan 36 persen responden menganggap Indonesia kurang demokratis. Sedangkan mereka yang menganggap Indonesia lebih demokratis hanyalah 17,7 persen dari 5.614 responden. Sejak periode pertama, apa yang dilakukan Jokowi, meminjam kata-kata Ben Bland, banyak menjelma sebagai "langkah-langkah mundur seperti pada tahun kepemimpinan Soeharto."

Di bawah Jokowi pula, pasal karet UU ITE sering digunakan, terutama oleh politikus. Penggunaan UU ITE untuk menjerat warga sipil sering tidak berimbang. Aktivis di era Jokowi sudah merasakan bagaimana pasal karet ini digunakan untuk membungkam kritik lewat media sosial, tapi tidak digunakan untuk mereka yang melakukan pelanggaran dari kubu pendukung Jokowi.

Misalnya saja mantan dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Ia diperkarakan karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer di depan Istana Negara. Robet disangkakan telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan" pada 2019.

Kemudian, ada jurnalis dan aktivis HAM Dandhy Laksono yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Dandy pada Jumat dini hari, 27 September

2019. Dandhy dikenai pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2009 tentang perubahan atas UU 8/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bagi Made Supriatma, kelakuan Jokowi makin hari makin menyerupai Soeharto dalam membungkam kritik.

"Jokowi punya perangkat hukum yang bikin Soeharto iri. UU ITE umpamanya. Dia kasih payung hukum untuk bertindak seperti Soeharto, tapi dengan *concern* hukum dan secara legal. Di situ, saya kira, yang membuat Jokowi sangat berkuasa. Dia tidak punya lagi perhatian pada rakyat biasa. Hilang semua reformasi dan korupsi yang selama ini dia gemborkan," ucap Supriatma kepada *Tirto*.

Jika kritik masyarakat sudah tak bisa lagi didengarkan, semoga Jokowi belum melupakan nasihat almarhumah ibunya:

"Ketika kamu memutuskan untuk terjun ke politik, itu adalah sebuah panggilan untuk mengabdi pada masyarakat dan bukan sebagai perhitungan berapa modal yang dikeluarkan dan berapa yang harus kembali. Kekayaan hanyalah titipan, karena dalam setiap kekayaan yang kita miliki sesungguhnya terdapat hak masyarakat yang ada di sekitar kita tinggal," kata Sujiatmi.

Buzzer dan Permainan Politik Identitas

Gaya Jokowi dahulu sebagai pemimpin Jakarta yang gemar *blusukan* menjadi daya tarik internasional. Ketika terpilih sebagai Presiden pada 2014 wajahnya muncul di sampul majalah *Time* dengan tajuk utama: "A New Hope"—Harapan Baru.

Banyak orang di luar negeri menyejajarkan Jokowi dengan Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama populer karena berasal dari kelompok minoritas. Sedangkan Jokowi populer karena terkesan datang dari kelompok bawah. Keduanya juga menggunakan jejaring anak muda untuk mendongkrak popularitas. Kepopuleran inilah yang berhasil dimanfaatkan Jokowi untuk kemenangan elektoral.

Cara Jokowi paling utama untuk meraih popularitas adalah melalui media, baik media massa maupun media sosial. Pada pemilihan Gubernur Jakarta 2012, penggunaan media sosial menjadi terobosan baru dalam kampanye. Secara mengejutkan, Jokowi-BTP bisa mengalahkan petahana.

Penggunaan media sosial sebenarnya adalah teknik "sekali mendayung dua-tiga pulau terlewati." Selain efektivitas, Jokowi-BTP mengakali dana kampanye yang terbatas. Mereka hanya didukung oleh dua partai, PDIP dan Gerindra. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli didukung oleh 7 partai. Hasil pengumpulan sumbangan kampanye Jokowi-BTP hanya mencapai Rp16,3 miliar. Sementara dana kampanye sang lawan mencapai Rp62,6 miliar.

Jokowi-BTP hanya menghabiskan Rp16 miliar, sedangkan Foke-Ramli hampir ludes dengan penggunaan Rp62,5 miliar. Tapi, perolehan suara mereka berbeda lebih dari 350 ribu suara dengan keunggulan pasangan Jokowi-BTP.

Jokowi, seperti tercatat dalam penelitian Muninggar Sri Saraswati berjudul "Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia", punya kelompok relawan yang lebih serius daripada Foke-Ramli. Relawan ini membuat wadah tersendiri bagi pegiat media sosial bernama Jokowi Ahok Social Media Volunteers (Jasmev). Salah satu yang bergabung di sana

adalah pemilik akun Twitter @kurawa yang dikenal dengan nama Rudi Valinka atau Rudi Sutanto.

Akun @kurawa berkali-kali berusaha mendiskreditkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Foke. Sedangkan Foke berusaha menangkal dengan menggunakan akun @TrioMacan2000 yang dikelola Raden Nuh dan Abdul Rasyid. Akun ini sempat meminta Rp1 miliar kepada Jokowi-BTP untuk menggunakan jasanya, tapi ditolak.

Hasilnya, @TrioMacan2000 tidak mampu menangkal kampanye dari @kurawa dan kawan-kawan di Jasmev. Inilah awal kesuksesan Jokowi dalam menggunakan media sosial.

Media sosial menjadi kunci pola marketing politik terbaru. "Inilah yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok dan membuat mereka memenangi gelanggang elektoral," kata peneliti Remotivi, Wisnu Prasetya Utomo, dalam tulisan berjudul "Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012" (2013).

Pada 2014, Jasmev kembali aktif. Admin akun @TrioMacan2000 juga ditangkap oleh polisi dan kredibilitasnya menurun. Otomatis lawan Jokowi di media sosial makin berkurang. Salah satu pesaing paling besar, tabloid Obor Rakyat, yang menebar tuduhan hoaks bahwa Jokowi keturunan PKI, pemiliknya juga ditangkap polisi.

Setelah menang, pekerjaan relawan Jokowi ini tidak selesai begitu saja. Justru setelah itu muncul orang-orang yang makin giat menyuarakan Jokowi di media sosial. Titik baliknya terjadi sekitar 2016 menjelang Pilkada Jakarta. Akun Twitter seperti @DennySiregar, @EkoKuntadhi, @PepihNugraha makin tenar dan ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial.

Setelah BTP kalah dalam pemilihan gubernur, mereka kemudian masuk ke dalam isu nasional. Berkali-kali memuja-

muja kinerja Jokowi-JK dan menyerang balik berbagai kritik yang muncul terhadap pemerintahan Jokowi. Aksi ini ramai dilakukan sampai sekarang. Kini akun Twitter anonim @digeeembok juga ikut serta.

Tidak jarang, omongan mereka dilandasi klaim-klaim tanpa bukti. Misalnya saja soal tudingan Taliban di KPK oleh Denny Siregar. Sampai sekarang hal itu tidak pernah benar-benar terbukti. Omongan ini menjadi senjata untuk melawan aspirasi mahasiswa yang tidak sepakat dengan revisi UU KPK.

Dua peneliti asal Australia, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, menyatakan setelah 21 tahun berlalu, demokrasi Indonesia berada pada titik terendah di tangan Jokowi.

Seperti Jokowi yang meniru kesuksesan Obama, bukan tidak mungkin tren menggalang relawan-relawan pendukung di media sosial yang menyebarkan informasi "abu-abu" akan terus berulang di kemudian hari. Kritik kepada pemerintah bukan lagi menjadi keistimewaan, tapi justru harus dilakukan dengan upaya lebih keras karena jika tidak hati-hati, tantangannya adalah penjara.

Relawan-relawan dan tren *buzzer* alias pendengung ini akan terus jadi andalan di dalam politik Indonesia. Asalkan narasi mereka bisa dikombinasikan dengan tindakan aparat negara, kemungkinan besar kemenangan dalam pemilu ada di depan mata.

"Buzzer ini adalah industri. Karena ini uang. Sekali dia diciptakan dan dia ada, itu akan tetap ada. Siapa pun akan memakai itu apapun ideologinya. Itu sudah jadi hukum besi dalam politik," kata Supriatma.

Media sosial adalah awal dari masa kejayaan Jokowi di Indonesia. Menurut Made Supriatma, Jokowi paham betul pentingnya media sosial ketika menuju Jakarta pada 2012.

Pencitraannya mantap. Sebagian besar orang menganggapnya antitesis dari semua elite politik di Indonesia. Dari situlah dia berhasil dipilih dan lewat media sosial ini pula Jokowi memberikan warisannya.

Dia berhasil merebut suara kelompok Islam, terutama dari kalangan *nahdliyin*, yang merupakan mayoritas di Indonesia, sekaligus kelompok minoritas melalui media sosial. Lewat media sosial pula akun-akun pendengung Jokowi menciptakan perpecahan ideologis dan mengkapitalisasi identitas masyarakat Indonesia yang beragam.

Jika ada yang mengatakan Prabowo mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, itu memang nyata adanya. Tapi, jangan lupa, ketika Jokowi menyasar kelompok pluralis dan minoritas, menurut Made Supriatma, "Jokowi memakai agama lebih banyak daripada Prabowo."

PENGHARGAAN

Laporan kami tentang Pilkada Solo dan bisnis keluarga Presiden Jokowi dikerjakan selama November hingga awal Desember 2020.

Irwan Syambudi dan Zakki Amali mendatangi Kota Solo dan bertemu sedikitnya 30 narasumber, 24 orang dari mereka bersedia dikutip untuk laporan tersebut. Adhi Baskara, Aulia Adam, dan Reja Hidayat mengakses 40 akta perusahaan yang terafiliasi dengan bisnis Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep serta Bobby Nasution, putra dan menantu Presiden Jokowi. Kami juga meminta tiga "expert" untuk mengomentari temuan-temuan kami.

Pada satu pekan terakhir, untuk laporan mengenai dugaan makelar KTP pada Pilkada Solo, kami berkolaborasi dengan *Suara.com* untuk menggali cerita yang menguatkan dugaan tersebut. Kami berterima kasih kepada Putri dan Ichsan Noor Rasyid yang berkontribusi mengonfirmasi dugaan tersebut kepada sejumlah warga Solo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kurawal Foundation, yang misi organisasinya serumpun dengan *Tirto* untuk memperkuat demokrasi, telah membantu penerbitan *e-book* ini.

Hanya dalam waktu enam tahun: anak dan menantu jadi wali kota, satu anak lagi jadi pengusaha. Dinasti politik baru di lingkaran Istana.

tirto.id
mengalir jernih mencerahkan

KURAWAL FOUNDATION
include | protect | engage